

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah.2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT.Sinar Grafika.
Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis,H.Amir Ilyas.*Hukum Acara
Pidana*.Kencana.Jakarta.

Bambang Waluyo.2014.*Pidana dan Pemidanaan*.PT.Sinar Grafika.Jakarta.

Darwan Print. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* Yayasan
LBH.Jakarta.

Hartono.2010.*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui
Pendekatan Hukum Progresif*.PT.Sinar Grafika.Jakarta.

H.Rusli Muhammad.2007.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*.PT.Citra
Aditiya Bakti.Bandung.

Lilik Muliadi.2017.*Hukum Acara Pidana (Normatif, teoretis dan
permasalahannya)*. PT.Alumni.Bandung.

Luhut M.P. Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana (surat-surat resmi
dipengadilan oleh advokat*. Djambatan. Jakarta.

Marwan Effendy.2012.*Sistem Peradilan Pidana(Tinjauan Terhadap
Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*.Referensi.Jakarta
selatan.

Moch. Faisal Salam.2001.*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*.CV.Mandar Maju.Bandung.

Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. PT.Grasindo.Jakarta.

Oly Viana Agustine. 2019. *Sistem Peradilan Pidana* .Rajawali Pers. Depok.

R.Soebekti.2010.Hukum Pembuktian.Pradnya Paramita.Jakarta.

Rusli Muhammad. 2006.*Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Raja Grafindo.Jakarta

Simorangkir.1983.Kamus Hukum.Djambatan.Jakarta.

Supriyadi W. Eddyono dkk. 2014. *Praperadilan di Indonesia :Teori,Sejarah,dan Praktiknya* .Institute for Criminal Justice Reform.Jakarta Selatan.

Peraturan Perundang-Undang

PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011.

Perkap Nomor 14 tahun 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan pertama undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberi pedoman terhadap pemeriksaan praperadilan yang diatur pada pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali.

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks

Jurnal

Anne Safirana, W.M. Herry Susilowati, Maria Ulfah."Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana"Jurnal Mimbar Hukum.Fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan.Vol. 29.Nomor 1 Februari 2017.

Roberts K."Perluasan kewenangan praperadilan sebagai lembaga pencari keadilan pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014"Jurnal Civitas.Fakultas hukum Universitas Batam.Vol. 2.Nomor 1 September 2019.

Sahri Sebayang."Praperadilan sebagai salah satu upaya perlindungan tersangka dalam pemeriksaan di tingkan penyidikan (studi

pengadilan negeri medan)” Jurnal Hukum Kaidah.Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol. 19.Nomor 2 Januari 2020.

Maskur Hidayat.”Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan”.Jurnal Yuridika.Fakultas hukum Universitas Airlangga.Vol. 30.Nomor 3 September 2015.

Muhammad yusuf dan Zainal Abidin Pakpahan.”kewenangan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ditinjau dari segi hukum”.Jurnal Advokasi. sekolah tinggi ilmu hukum labuhan batu.Vol. 06.Nomor 2 September 2018.

Skripsi

Dandy Ilham Raharjo.2016. “Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan perkara pidana (Putusan Nomor :04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL)”.skripsi.sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Andreas R.K Ronsumbre. 2015. “Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(sp3) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga”.skripsi. sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.Yogyakarta.

Tesis

Bernadetta rumondang F S. 2016. "Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan". Tesis. Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Briwijaya. Malang.